

ABSTRAK

Indriani, NIM.1711143033, Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di tinjau dari Perspektif PERDA Nomor 1 Tahun 2017 atas Perubahan PERDA Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Tulungagung, 2018, Pembimbing Prof. Dr. H. Hasyim Nawawie, S.H.,M.Si.

KATA KUNCI : Retribusi Parkir, PERDA No 1 Tahun 2017 Kabupaten Blitar, Hukum Islam.

Penelitian ini dilatar belakangi adanya pemungutan retribusi parkir yang tidak sesuai antara kejadian dilapangan dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, yang khususnya terjadi di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:1.)Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar ? 2.)Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar menurut perspektif PERDA Nomor 1 Tahun 2017 Perubahan atas PERDA Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum? 3.)Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar menurut hukum islam? Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 1.)Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi parkirtepi jalan umum di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar 2.)Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar menurut hukum positif 3.)Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar menurut hukum islam.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif, jenis penelitian lapangan dan bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Untuk mengecek suatu keabsahan temuan peneliti menggunakan teknik seperti perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan, observasi yang diperdalam, triangulasi, pembahasan dengan sejawat. Sedangkan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian ini adalah 1) Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum dikecamatan kesamben dilakukan oleh seorang juru parkir, bahwasanya setiap kendaraan roda dua yang menggunakan jasa parkir dikenakan tarif sebesar Rp.500 – Rp.1000 baik yang menggunakan parkir berlangganan maupun biasa, hal tersebut bertolak belakang dengan peraturan daerah yang berlaku. 2) Sedangkan dalam peraturan daerah nomor 1 tahun 2017 atas revisian peraturan daerah nomor 23 tahun 2011 pasal 50 menyatakan bahwa tarif bagi kendaraan roda dua yang parkir di tepi jalan adalah Rp. 500 dan bagi yang menggunakan parkir berlangganan tidak di pungut biaya karena sudah membayar di setiap tahunnya. 3) Dan dalam hukum islam, pelaksanaan pemungutan retribusi parkir merupakan suatu hal yang dibolehkan asalkan tidak melanggar syariah islam serta tidak merugikan umat manusia.

ABSTRACT

Indriani, NIM.1711143033, Implementation of Public Road Parking Levy Collection in Review of Positive Law Perspective and Islamic Law (Case Study in District Kesamben Blitar), Department of Islamic Economic Law, IAIN Tulungagung, 2018, Supervisor Dr. H. Hasyim Nawawie, S.H., M.Si.

KEY WORDS: Parking Levy, Positive Law, Islamic Law.

This research is based on the existence of unlawful parking levy collection between the occurrence of field in the regulation made by the government, especially in Kesamben District, Blitar Regency.

The formulation of the problem in this research are: 1) How is the implementation of retribution of public roadside parking levy in Kecamatan Kesamben, Blitar regency? 2.) How is the implementation of public roadside levy collection levies in Kesamben sub-district of Blitar Regency according to positive law? 3.) How is the implementation of public roadside levy collection levies in Kecamatan Kesamben, Blitar regency? The purpose of this research are: 1.) To know how the implementation of retribution of parking public roadside in District Kesamben Blitar 2.) To know how the implementation of retribution of public roadside parking levy in District Kesamben Blitar according to positive law 3.) To find out how the implementation of retribution levy of public roadside parking in Kecambang District of Blitar Regency according to Islamic law.

Research method used by researcher is qualitative method, field research type and is descriptive. Data collection techniques used in this study include participant observation, in-depth interviews and documentation. To check a validity of the findings of researchers using techniques such as extension of the presence of field researchers, deepened observation, triangulation, discussion with peers. While data analysis using data reduction, data presentation and conclusion.

The results of this study are 1) Implementation of retribution of public roadside parking levy dikecamatan kesamben done by a parking attendant, that every two-wheeled vehicle that uses parking services charged tariff of Rp.500 - Rp.1000 either using ordinary parking subscription, things contrary to prevailing local regulations. 2) Whereas in the regional regulation number 1 of 2017 on the revision of the regional regulation number 23 of 2011 article 50 states that the tariff for two-wheeled vehicles parking on the roadside is Rp. 500 and for those who use the parking subscription is not in charge because it has paid in each year. 3) And in Islamic law, the

implementation of parking retribution is a permissible thing as long as it does not violate Islamic sharia and does not harm humanity.